



Manajemen Pembelajaran Guru Mata Pelajaran IPS SD Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Fitri Yanty Muchtar

Universitas Negeri Makassar

Email: fitriyanti@gmail.com

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran IPS SD dan manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran IPS SD. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dan tempat penelitian di sekolah dasar kecamatan Rappocini kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data yang simultan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam manajemen pembelajaran di sekolah dasar kepala sekolah berperan sebagai education, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator dan entrepreneur. Kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di kelas. Sebagai kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran guru dalam hal ini merencanakan pengawasan terhadap kinerja guru dimulai dari perencanaan manajemen pembelajaran IPS, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan evaluasi dan tindak lanjut. Guru berperan sebagai manajer dalam sebuah kelas yang bertugas mengelola pembelajaran dan hasil belajar. Manajemen pembelajaran pada mata pelajaran IPS meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan siswa. Manajemen guru dalam pembelajaran IPS menjalankan amanah kurikulum, silabus pembelajaran IPS, rencana pelaksanaan pembelajaran, metode, strategi pembelajaran IPS, dan evaluasi pembelajaran IPS serta bahan ajar

Kata Kunci: Kepala Sekolah; Manajemen Pembelajaran; Mata Pelajaran IPS

Abstract. The objective of this research is to know the role of principal in the management of teacher learning in the subjects of IPS SD and the management of teacher learning in the subjects of IPS SD. The type of research is qualitative descriptive and place of research in elementary school subdistrict of Rappocini city of Makassar. Data collection is done by observation, interview, and documentation with analysis technique through data reduction, data display, and simultaneous data verification. The results show that in the learning management in primary school the principal acts as education, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator and entrepreneur. The principal plays an important role in mobilizing teachers in optimizing their function as managers in the classroom. As the principal in teacher learning management in this case planning supervision on teacher performance starting from learning management planning of IPS, implementation of learning, supervision of evaluation and follow up. The teacher acts as a manager in a class that is responsible for managing learning and learning outcomes. The learning management of IPS subjects includes planning, organizing, controlling (guiding) activities and evaluating activities related to the learning process of students. The management of teachers in IPS lessons runs the curriculum, IPS learning syllabus, learning implementation plan, method, IPS learning strategy, and evaluation of social studies and teaching materials

Keywords: Headmaster; Learning Management; IPS Subject

PENDAHULUAN

Eksistensi guru yang kompeten dan profesional merupakan syarat mutlak hadirnya sistem pendidikan yang berkualitas. Guru memainkan peran penting dalam transformasi budaya melalui sistem pendidikan, khususnya dalam menata interaksi murid dengan guru untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Untuk itu diperlukan guru yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai, mutu kepribadian yang mantap, serta menghayati profesinya sebagai guru. Profesi keguruan merupakan kegiatan yang membutuhkan berbagai kemampuan, sedangkan kemampuan tersebut memerlukan pelatihan, baik berupa latihan kemampuan yang terbatas maupun kemampuan yang terintegrasi dan mandiri.

Menurut Badan Nasional Standar Pendidikan (2006: 88) kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan secara luas dan mendalam yang meliputi: (1) konsep, struktur, dan metode keilmuan, materi ajar; (2) materi ajar ada dalam kurikulum sekolah; (3) hubungan antar konsep mata pelajaran terkait; (4) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (5) tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Secara sederhana kompetensi berarti kemampuan, suatu jenis pekerjaan tertentu dapat dilakukan seseorang jika ia memiliki kemampuan. Jika dikaji lebih dalam lagi, kemampuan atau kompetensi bukan semata-mata menunjukkan pada keterampilan dalam melakukan sesuatu. Lebih dari itu, kemampuan ini dapat diamati dengan menggunakan empat macam petunjuk yaitu: (1) ditunjang oleh latar belakang pengetahuan, (2) adanya penampilan atau *performance*, (3) kegiatan yang menggunakan prosedur dan teknik yang jelas, dan (4) adanya hasil yang dicapai. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah dengan menempatkan pendidikan sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian khusus dengan menyediakan anggaran yang memadai. Selain itu, jaminan kesejahteraan hidup bagi para guru adalah suatu aspek fundamental agar tercipta para guru yang berkualitas, berkompeten, dan profesional.

Keberadaan guru yang kompeten dan profesional merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat memberi kontribusi yang besar terhadap dunia

pendidikan. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan upaya ke arah peningkatan kualitas pendidikan, karena di Era globalisasi ini sangat dituntut adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keunggulan, kompetitif yang sesuai standar mutu pendidikan nasional. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada pembelajaran memegang peranan penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas.

Guru atau pendidik adalah tenaga profesional seperti yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat”, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu “guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Landasan yuridis dan kebijakan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru sebagai pelaksana pendidikan pada pembelajaran yang bermuara akhir pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan.

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 yang mensyaratkan guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan Pasal 8 Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma empat (D 4) atau Strata satu (S1) dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.

Membicarakan kualitas sumber daya manusia tidak akan dapat dilepaskan dengan kualitas pendidikan, mengingat pendidikan mempunyai peran signifikan dan bahkan masih menjadi persyaratan utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan sudah dilakukan. Namun demikian upaya ini belum berhasil secara optimal. Hal ini tampak dari beberapa indikator antara lain: (a) rendahnya mutu, (b) banyaknya kritik yang terkait dengan masalah rendahnya kualitas, disiplin, kreativitas, moral serta sikap demokratis, (c) kemampuan guru yang bervariasi, (d) kondisi lingkungan sekolah yang tidak memadai Sukamto dalam Rakhmiyanti (2013).

Indikator guru profesional dan kompeten adalah guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan keilmuan yang hari demi hari semakin canggih. Selain itu, guru yang profesional dan kompeten juga harus mampu menerapkan model dan metode pembelajaran berdasarkan tuntutan waktu dan kebutuhan murid. Penerapan pola ini akan menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar, *ikhlas* dalam mengajar, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas termasuk murid yang berprestasi. Meskipun pada kenyataan yang terjadi masih banyak guru yang belum mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam belajar, karena guru cenderung berfikir hanya untuk menggugurkan kewajiban dalam memenuhi jumlah jam mengajar.

Permasalahan-permasalahan di atas harus dipecahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Suparlan, 2010:6), bahwa "Persoalan pendidikan adalah persoalan yang lingkupannya seluas persoalan kehidupan manusia itu sendiri." Persoalan guru harus mendapat perhatian lebih banyak karena guru merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pendidikan. Guru mengembang tugas untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, mutu atau kualitas guru juga turut menentukan mutu pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal atau diakui oleh masyarakat. Di

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" dan Ayat 3 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun generasi penerus dan sektor yang penting dalam upaya mewujudkan profesional dan siap pakai. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh-kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Pada gilirannya manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan, karena itu, pendidik dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak melakukan kesalahan mendidik sebab kesalahan mendidik bisa berakibat fatal karena sasaran pendidikan adalah manusia. Kesalahan mendidik hanya dapat dihindari jika pendidik memahami apa pendidikan itu sebenarnya. Gambaran yang jelas dan benar tentang pendidikan dapat diperoleh melalui pengkajian terhadap arti dan tugas pendidikan, konsep yang mendasari unsur-unsurnya dan kesatuan unsur itu dalam suatu wujud sistem.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi disini pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya Ujian Nasional sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20, Tahun 2003. Jabaran UUD RI 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Guru sebagai salah satu unsur pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Guru juga merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat instutisional dan instruksional peran strategis tersebut sejalan dengan undang-undang yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga professional dan agen pembelajaran.

Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi bagi peserta didik. Bentuk nyata yang dapat dilihat dan dirasakan dari kegiatan belajar ini adalah hasil belajar dan untuk meningkatkan hasil belajar di perlukan pula peran guru berupa keterampilan dalam mengelola kelas dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

Kinerja guru berkaitan dengan proses belajar mengajar yaitu kesanggupan seorang guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antar guru dan peserta didik

yang mencakup pengembangan aspek afektif, psikomotorik dan kognitif, sejalan dengan aspek-aspek tersebut pembelajaran pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) memiliki tujuan yaitu untuk memahami pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan sosial, kewarganegaraan, fakta, peristiwa, konsep dan generalisasi serta mampu merefleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial memegang peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini karena mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan pendidikan nasional, juga merupakan tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Masalah pendidikan dan manajemen pembelajaran di kelas merupakan masalah yang cukup kompleks dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Faktor tersebut diantaranya adalah guru, peserta didik, ruang kelas, komunikasi dalam pembelajaran, motivasi peserta didik, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, model, strategi dan metode pembelajaran. Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan di dalam kelas, kebutuhan terhadap manajemen di kelas, bukan hanya karena kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran melalui pengoptimalan fungsi kelas namun lebih dari itu manajemen pembelajaran di dalam kelas merupakan respon terhadap semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas pendidikan.

Kegiatan mengelola sistem pembelajaran di kelas membutuhkan kemampuan secara profesional dari guru, guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam tetapi juga mampu memajemen penyelenggaraan pembelajaran serta dapat mempertanggungjawabkannya baik secara moral maupun dalam konteks keilmuan secara teoretis. Guru diwajibkan memiliki sikap dan profesional itu akan tetapi prakteknya tidak selamanya bebas hambatan.

Pelaksanaan pengajaran di dalam kelas merupakan salah satu tugas utama guru dan pengajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa. Dalam proses pembelajaran masih sering ditemui model pembelajaran bersifat

konvensional dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sekalipun berbagai inovasi telah dilakukan tetapi hasilnya belum memuaskan karena tidak terlihat adanya improvisasi dalam pembelajaran, jauh dari model pembelajaran yang modern sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi lingkungan dimana siswa itu berada. Guru lebih cenderung menggunakan ceramah yang hanya menuntut siswa pada kekuatan ingatan dan hafalan kejadian-kejadian serta nama-nama tokoh, tanpa mengembangkan wawasan berfikir dan penyelesaian masalah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar aktif. Dominasi guru dalam proses pengajaran menyebabkan kecenderungan siswa lebih bersifat pasif sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian guru dari pada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan.

Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidak mampuan guru di dalam mengelolah pembelajaran sehingga bermuara kepada menurunnya mutu pendidikan. Kalaupun sorotan itu lebih mengarah kepada sisi-sisi kelemahan pada guru, hal itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada guru, dan mungkin ada faktor yang berlaku, baik sengaja ataupun tidak akan berpengaruh terhadap permasalahan tersebut. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar dengan pencapaian hasil pembelajaran peserta didik baik pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah atas.

Rendahnya motivasi siswa dalam belajar Ilmu Pengetahuan Sosial serta rendahnya minat siswa untuk membaca buku pelajaran juga berdampak terhadap hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang masih banyak yang mengikuti remedial agar dapat memenuhi standar ketuntasan. Selain itu banyak ditemukan dimana siswa kurang siap dalam mengikuti pelajaran. Siswa datang ke sekolah tanpa bekal pengetahuan tentang materi yang akan dibahas di kelas.

Pada dasarnya penelitian ini, bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan di atas. Secara eksplisit tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui gambaran tentang manajemen

pembelajaran guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui peranan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan penelitian Studi Kasus pada tingkat organisasi Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosialnya tercapai, untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami apa yang terletak dibalik fenomena apa saja yang sedikit belum diketahui. Pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan pengalaman seseorang dengan suatu fenomena (Rulam Ahmadi, 2005:1). Menurut Emzir dalam Rakhmiyanti (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah "*deskriptif*". Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Sumber data penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sederhana (sengaja memilih orang yang dapat memberi penjelasan manajemen pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial) yang disesuaikan dengan kebutuhan data dan tujuan penelitian. Menurut McMillan & Schumacher dalam Nana Syaodih Sukmadinata (2013), teknik *purposive sampling* yaitu teknik dengan mendapatkan informasi dengan memilih informan kunci yang dianggap mengetahui informasi, kondisi, dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta lebih tepatnya ini dilakukan secara sengaja berdasarkan teknik yang sesuai dengan kondisi peristiwa yang sebenarnya. Sumber data atau informan dapat diuraikan

sebagai berikut : Kepala Sekolah Kecamatan Rappocini dan Guru SD Kecamatan Rappocini

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian antara lain adalah : Observasi langsung, Wawancara mendalam, dan Dokumentasi kemudian Instrumen atau alat pengumpulan data pada penelitian ini digunakan instrumen berupa : 1) Pedoman Wawancara, 2) Foto Dokumentasi. 3) Lembar Observasi.

Teknik analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan untuk

Teknik Pengabsahan Data. Menurut Satori dan Komariah (2010:164) penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirm, ability*). Berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Validitas Internal, Validitas eksternal (*Keteralihan/transferability*), Kebergantungan (*Dependability/-realibilitas*), Kepastian/objektivitas (*Confirmability*), dilakukan bersamaan dengan *dependability*, untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar dan mengambil lokasi Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan luas wilayah 9,23 Km² dan berdasarkan data UPTD Kecamatan Rappocini, terdapat 48 Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini. Peneliti mengambil sampel dengan tehnik *sampling random* sederhana. Peneliti mengambil enam sekolah sebagai lokasi penelitian dan dari hasil

memperoleh gambaran yang utuh tentang manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Hasil analisis ini dideskripsikan atau digambarkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, untuk lebih jelasnya gambaran teknik analisis data dapat dilihat pada penjelasan berikut : Kondensasi Data (*Condensation Data*), Penyajian Data (*Display Data*) dan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verivication*).

wawancara, studi dokumentasi serta observasi maka diperoleh gambaran umum berdasarkan profil sekolah, sebagaimana yang ada dalam data sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kompleks IKIP

Sekolah Dasar (Sekolah Dasar) Negeri Kompleks IKIP adalah sekolah dengan status Negeri dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101196009096 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40312060 beralamat Jalan Poros A.P.Pettarani Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini dibina oleh Kepala Sekolah, dan dibina oleh teman-teman guru sebanyak 25 orang dan untuk jumlah siswanya ada 522 orang, sarana dan prasarana memiliki 6 Ruang Kelas, 1 Lab. Komputer, 1 Ruang Perpustakaan, 1 Kantin Kejujuran dan Kantin Sehat, 1 Ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah), 1 Ruang Media Pembelajaran, 1 Ruang Gugus, 1 Ruang Koperasi, dan di Sekolah Dasar Negeri Kompleks IKIP terdapat Paguyuban sekolah yaitu perkumpulan orang tua siswa, Perrombel (Rombongan Belajar) mulai dari kelas 1.A-1.B s/d 6.A-6.B.

Adapun hasil belajar siswa dapat dilihat dari data rata-rata ketuntasan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tabel 4.1: Nilai KKM pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri Kompleks Ikip Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No	Kelas	KKM	Jumlah Siswa	Tidak mencapai KKM	Siswa yang mencapai KKM
1	IVA (empat)	70	46	-	Tuntas
2	IVB (empat)	70	49	-	Tuntas
3	VA (lima)	76	49	-	Tuntas
4	VB (lima)	72	43	-	Tuntas

5	VIA (enam)	75	46	-	Tuntas
6	VIB (enam)	77	45	-	Tuntas

Sumber Data : Daftar Keadaan Siswa dan Standar KKM Tahun Pelajaran 2014-2015 Sekolah Dasar Negeri Kompleks IKIP Makassar.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa para siswa di SD Negeri Kompleks IKIP Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah mencapai standar KKM atau tergolong Tuntas dikarenakan adanya kelengkapan dalam hal sarana, media, dan alat peraga pembelajaran dan juga adanya tambahan jam pelajaran di luar jam sekolah seperti bimbingan belajar.

2. Sekolah Dasar (SD) Inpres Gunung Sari Baru

Sekolah Dasar (SD) Inpres Gunung Sari Baru Makassar berlokasi di jantung Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Jalan Hertasing Blok E 14 No. 1 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini

Kota Makassar dengan luas lahan 17.950 m². Sekolah Dasar (SD) Inpres Gunung Sari Baru adalah sekolah dengan status Inpres Negeri dengan Nomor Statistik Sekolah (NISN) 101196004115 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40307598 dan sekolah ini terakreditasi B dan dibina oleh kepala sekolah dan dibina oleh teman-teman dengan jumlah guru 11 orang. Sekolah Dasar Gunung Sari Baru memiliki 3 gedung, 8 bilik, 1 perpustakaan, ruang guru dan ruangan Kepala Sekolah, perrombel (Rombongan Belajar) ada 6 rombel dan semua kelas memiliki ruangan masing-masing.

Adapun hasil belajar siswa dapat dilihat dari data rata-rata ketuntasan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tabel 4.2: Nilai KKM pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Inpres Gunung Sari Baru Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No	Kelas	KKM	Jumlah siswa	Tidak mencapai KKM	Siswa yang mencapai KKM
1	IV (empat)	69	19	-	-
2	V (lima)	69	22	-	-
3	VI.A (enam)	69	32	-	-
Total			73 siswa	-	-

Sumber Data : Daftar Keadaan Siswa dan Standar KKM Tahun Pelajaran 2014-2015 Sekolah Dasar (SD) Inpres Gunung Sari Baru Makassar.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa para siswa di SD Inpres Gunung Sari Baru Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah mencapai standar KKM atau tergolong Tuntas, walaupun para siswanya kebanyakan dari golongan urban atau kurang mampu hal ini tidak mengurangi motivasi mengajar bagi kepala sekolah dan para guru-guru SD Inpres Gunung Sari Baru.

3. Sekolah Dasar (SD) Inpres Tidung II

Sekolah Dasar (SD) Inpres Tidung II Terletak di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Rappocini beralamat di Jalan Bonto

Dg. Ngirate No 10 Ada sekolah ini terakreditasi B dengan Luas Lahan $41 \times 51 = 2091 \text{ m}^2$. Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101196009067 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40312028 dan dibina oleh Kepala Sekolah, dan dibina oleh teman-teman guru dengan jumlah guru 13 orang. Sekolah Dasar Inpres Tidung II memiliki 1 Gedung, 5 Bilik, 1 Kantor Kepala Sekolah, 1 Perpustakaan dan 1 Ruang Guru. Perrombel (Rombongan Belajar) ada 7 yaitu 2 rombel pada kelas 1(1A-1B) dan 1 rombel pada kelas 2 s/d kelas 6, dengan aturan kelas, 1 masuk pagi dan masuk siang bergantian

Tabel 4.3: Nilai KKM pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Inpres Tidung II Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No	Kelas	KKM	Jumlah Siswa	Tidak mencapai KKM	Persen (%)
1	IV (empat)	70	27	18	66.6%
2	V (lima)	70	29	19	65.51%
3	VI (enam)	73	31	21	67.74%
Total			87 siswa	58 siswa	66.67%

Sumber Data : Daftar Keadaan Siswa dan Standar KKM tahun pelajaran 2014 -2015 semester 2 Sekolah Dasar (SD) Inpres Tidung II Makassar.

Ket: Nilai KKM di atas diperoleh sebelum diadakannya Remedial dan setelah diadakan Remedial diperoleh hasil 100% Tuntas KKM Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa para siswa di SD Inpres Tidung II Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial hanya 29 siswa yang mencapai KKM, sedangkan 58 siswa mengalami tidak mencapai KKM. Dikarenakan kurangnya kesadaran siswa dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya dikarenakan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang cukup luas, alat peraga yang kurang memadai

mengakibatkan permasalahan dalam proses kegiatan belajar mengajar ini dapat dilihat dari hasil ujian dimana siswa tidak dapat menjawab beberapa butir soal dikarenakan siswa tidak pernah melihat alat peraga yang berkaitan dengan soal dan juga keadaan ekonomi para siswa yang tergolong kurang mampu. Maka diperlukan Remedial agar semua siswa di SD Inpres Tidung II Kecamatan Rappocini Kota Makassar memperoleh Nilai KKM yang Tuntas.

4. Sekolah Dasar (SD) Inpres Kassi-Kassi I

Sekolah Dasar Inpres Kassi-Kassi I terletak di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Rappocini beralamat di Jalan Palm Raja Kelurahan Kassi-Kassi. Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101196004106 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40307580 dengan Luas Tanah 965 m²/HGB, Luas Bangunan 448 m² dan sekolah ini Terakreditasi B. Dibina oleh Kepala Sekolah dan dibina oleh teman-teman dengan jumlah guru 16 orang. Sekolah Dasar Inpres Kassi-Kassi memiliki 2 Gedung Utama, 6 Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan menyatu dengan Ruang Kelas II, Ruang Guru menyatu dengan Ruangan Kantor Kepala Sekolah. Perrombel (Rombongan Belajar) ada 9, masuk pagi berpasangan yaitu kelas 1A-1B, 2A-2B, 6A dan 6B sedangkan kelas 3, 4, 5 tunggal (1 rombel).

Tabel 4.4: Nilai KKM pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Inpres Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No	Kelas	KKM	Jumlah Siswa	Tidak Mencapai KKM	Persen (%)
1	IV (empat)	70	32	3	3%
2	V (lima)	70	40	-	0%
3	VIA (enam)	75	28	5	4%
4	VIB (enam)	75	27	-	0%
Total			114 siswa	8 siswa	7 %

Sumber Data : Daftar Keadaan Siswa dan Standar KKM Tahun Pelajaran 2014-2015 Semester 2 Sekolah Dasar Inpres Kassi-Kassi 1 Makassar.

Ket: Nilai KKM di atas diperoleh sebelum diadakannya remedial dan setelah diadakan Remedial diperoleh hasil 100% Tuntas KKM Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa para siswa di SD Inpres Kassi-Kassi I Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial hanya 106 siswa yang mencapai KKM atau Tuntas, sedangkan 8 siswa tidak mencapai KKM atau tidak Tuntas. Kurangnya minat baca siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dikarenakan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang meluas dibandingkan kemampuan daya serap siswa, alat peraga yang kurang memadai sehingga siswa hanya menerima materi dan penjelasan dari buku dan LKS, dan juga keadaan ekonomi para siswa yang tergolong kurang mampu. Maka diperlukan Remedial dan tambahan waktu belajar agar semua siswa di SD Inpres Kassi-Kassi I Kecamatan Rappocini Kota Makassar memperoleh Nilai KKM yang Tuntas.

Sekolah Dasar (SD) Inpres Banta-Bantaeng 1 terletak di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Rappocini beralamat di Jalan Monginsidi Baru No. 75 Kelurahan Ballaparang. Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101196009067 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40313762 Tipe Inpres Negeri dan sekolah ini Terakreditasi C dengan Luas Tanah 168 m². Dibina oleh Kepala Sekolah, dan dibina oleh teman-teman dengan jumlah guru 11 orang. Sekolah Dasar (SD) Inpres Banta-Bantaeng memiliki 1 Gedung, 3 Bilik, 1 Ruang Perpustakaan dan 1 Kantor Kepala Sekolah. Perrombel (Rombongan Belajar) ada 6 rombel. Menurut aturan Sekolah Dasar Inpres Banta-Bantaeng dua minggu masuk siang dan seminggu masuk pagi berlaku untuk kelas 3, 4 dan 5. Karena ada kelas yang hanya dipakai pada pagi hari untuk kelas 6 dan untuk kelas 1 dan 2 bergantian masuk (07.00) pagi dan (10.00) siang.

5. Sekolah Dasar (SD) Inpres Banta-Bantaeng 1

Tabel 4.5: Nilai KKM pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Inpres Banta-Bantaeng I Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No	Kelas	KKM	Jumlah Siswa	Tidak Mencapai KKM	Persen (%)
1	IV (empat)	68	38	4	3.6 %
2	V (lima)	64	41	-	-
3	VI (enam)	68	32	-	-
Total			111 siswa	4 siswa	3.6%

Sumber Data : Daftar Keadaan Siswa SDN Inpres Banta-Bantaeng I dan Standar KKM tahun pelajaran 2014 -2015 semester 2 SDN Inpres Banta-Bantaeng I Makassar.

Ket: Nilai KKM di atas diperoleh sebelum diadakannya remedial dan setelah diadakan remedial diperoleh hasil 100% tuntas KKM mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa para siswa di SD Negeri Inpres Banta-Bantaeng I Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial hanya 107 siswa yang mencapai KKM atau Tuntas, sedangkan 4 siswa tidak mencapai KKM. Persoalan utama yang peneliti temukan adalah permasalahan ekonomi, dimana 99% siswa kategori dibawah garis kemiskinan, alat peraga yang kurang memadai sehingga ada kendala dalam proses belajar mengajar. Maka diperlukan Remedial dan pengayaan agar semua siswa di SD Inpres Banta-Bantaeng I Kecamatan Rappocini Kota Makassar memperoleh Nilai KKM yang Tuntas.

6. Sekolah Dasar (SD) Inpres Negeri Aroepala

Sekolah Dasar (SD) Negeri Aroepala terletak di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Rappocini beralamat di Jalan Aroepala Kelurahan Gunung Sari dan sekolah ini belum terakreditasi, Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101196004168 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 4031 dengan luas tanah 2144 m². Dibina oleh Kepala Sekolah dan dibina oleh guru-guru dengan jumlah guru 15 orang. Memiliki 5 Gedung, 8 Ruang Kelas, 1 Ruang Perpustakaan dan 1 Kantor Kepala Sekolah. Perrombel (Rombongan Belajar) mulai dari kelas 1 s/d kelas 6, dengan aturan yang masuk pagi kelas (1, 2, 6) dan masuk siang kelas (3, 4, 5) bergantian.

Tabel 4.6: Nilai KKM pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Inpres Negeri Aroepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No	Kelas	KKM	Jumlah siswa	Tidak mencapai KKM	Persen (%)
1	IVA (Empat)	70	27	6	22%
2	IVB (Empat)	70	28	3	10.7%
3	VA (Lima)	70	24	5	20.8%
4	VB (Lima)	70	25	3	12%
5	VIA (Enam)	73	32	5	15.6%
6	VIB (Enam)	73	31	6	19.4%
Total			167 Siswa	28 Siswa	16.7%

Sumber Data : Daftar Keadaan dan Standar KKM Tahun Pelajaran 2014 -2015 semester 2 Sekolah Dasar Negeri Aroepala Makassar.

Ket: Nilai KKM di atas diperoleh sebelum diadakannya remedial dan setelah diadakan remedial diperoleh hasil 100% tuntas KKM mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa para siswa di SD Negeri Aroepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial hanya 139 siswa yang mencapai KKM atau Tuntas, sedangkan 28 siswa tidak mencapai KKM. Kurangnya alat peraga ditambah dengan sarana dan prasarana yang belum memadai dikarenakan sekolah ini dalam tahap pembangunan, dimana SD Negeri Aroepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang tergolong baru dan belum terakreditasi. Maka diperlukan Remedial agar semua siswa di SD Inpres Aroepala

Kecamatan Rappocini Kota Makassar memperoleh Nilai KKM yang Tuntas.

B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Guru tentang Manajemen Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan beberapa guru Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Kurikulum

ER mengatakan bahwa, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan tertentu (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015). Sedangkan HO mengatakan bahwa, Kurikulum merupakan suatu bentuk manajemen yang menentukan arah pendidikan di tingkat dasar dan menengah (Hasil Wawancara tanggal 30 Juli 2015).

DA juga mengatakan bahwa, Kurikulum adalah acuan atau patokan yang digunakan dalam proses pembelajaran (Hasil Wawancara tanggal 28 Juli 2015). Hal senada juga diungkapkan AN, yang mengatakan bahwa Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan, dan dimana di dalam kurikulum tersebut berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan (Hasil Wawancara tanggal 28 Juli 2015).

BA juga mengatakan bahwa, Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan, dan dimana di dalam kurikulum tersebut berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan (Hasil Wawancara tanggal 27 Juli 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru sekolah dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah cukup memahami tentang kurikulum yang menjadi pedoman dalam pembuatan perangkat pembelajaran dan rencana persiapan belajar mengajar.

b) Manajemen Pembelajaran

HO mengatakan bahwa Manajemen Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dikatakan sebagai : (1) Manajemen bersifat terikat dengan kurikulum menjadikan manajemen pembelajaran bersifat tertutup, (1) Manajemen bersifat bebas, dimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari materi melalui internet atau buku-buku yang lain yang artinya kurikulum mengarahkan kami dalam batasan mengajar agar anak terarah namun tidak membatasi anak untuk menambah pengetahuannya sesuai kemampuannya masing-masing (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015). RA juga mengatakan bahwa dengan adanya manajemen pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sangat bagus, dikarenakan penyusunannya dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang

pedidikan suatu kebutuhan pendidikan (Hasil Wawancara tanggal 25 Juli 2015).

Hal senada juga diungkapkan HA yang mengatakan bahwa, Manajemen pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar sebenarnya cukup bagus terutama bagi kami sekolah yang dimana siswa kami banyak yang kategori kurang mampu, bantuan dana Bantuan Operasional Siswa sudah cukup membantu namun karena materi Ilmu Pengetahuan Sosial itu sangat meluas maka terkadang kami kekurangan alat peraga walaupun sudah ada bantuan dan dihubungkan dengan manajemennya, karena kurangnya alat peraga dan kebanyakan bercerita, bahan ajar sangat banyak untuk dicermati siswa sehingga anak terlihat bosan dan kurang tertarik dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Hasil Wawancara tanggal 31 Juli 2015).

ER juga mengatakan bahwa, untuk manajemen pembelajaran tidak menemukan kesulitan karena kepala sekolah dalam hal ini berperan dengan melatih kami dalam : (1) Kegiatan membuat rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus, (2) Menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan yang sesuai dengan materi sehingga memudahkan mencapai tujuan (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015).

Akan tetapi SA, yang mengatakan bahwa manajemen pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar terkadang bisa dijangkau dan terkadang sulit dijangkau dalam proses pembelajaran jika dihubungkan dengan manajemennya, dikarenakan kurangnya alat peraga dan kebanyakan bercerita bahan ajarnya sangat banyak untuk dicermati siswa (Hasil Wawancara tanggal 31 Juli 2015).

Berbeda dengan MA yang mengatakan bahwa, manajemen pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar di kelas 6, sangat luas dan selalu ada hal baru dan terkadang anak bingung untuk mengingat semua materi karena harus banyak membaca dan mengerti tentang peta sedangkan minat baca anak tidak semuanya sama (Hasil Wawancara tanggal 23 Juli 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa, manajemen pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada dasarnya sama, akan tetapi ada beberapa sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar dikarenakan selalu ada hal baru dan

beberapa kondisi sekolah dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang memberikan pengaruh terhadap manajemen pembelajaran itu sendiri.

Dalam mengelola pembelajaran, guru sebagai manajer melaksanakan berbagai langkah-langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan dan sesuai dengan observasi lapangan. Menurut ER, perencanaan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran lainnya, yaitu membuat suatu rencana pembelajaran yang disertai dengan prinsip pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sering dianggap sulit bagi siswa, karena hanya membentuk budaya menghafal dan bukan berfikir kritis. Sehingga guru harus menggunakan berbagai strategi, model dan metode yang menarik bagi siswa (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015).

RA juga mengatakan bahwa, pelaksanaan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik sesuai kurikulum yang ada sekarang, hanya saja perlu ada perbaikan-perbaikan dengan keadaan sekarang dan jam-jam mengajar ilmu pengetahuan sosial ditambah (Hasil Wawancara tanggal 25 Juli 2015). Hal senada dengan SA yang mengatakan bahwa, pelaksanaan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan perencanaan pelajaran yaitu 3 (tiga) jam pertemuan yang dibagi sebanyak dua kali pertemuan dalam seminggu, namun dalam masalah waktu yang masih kurang dibanding dengan luasnya pembahasan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (Hasil Wawancara tanggal 31 Juli 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan manajemen pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Akan tetapi jam mengajar para guru dianggap masih kurang dikarenakan luasnya materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial.

- Strategi, Model dan Metode Pembelajaran

Menurut ER yang mengatakan bahwa, ada beberapa pilihan strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya dengan

menggunakan strategi *kontekstual teaching* dan *learning eksposit cooperative learning*, metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015). DA juga mengatakan bahwa, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, strategi yang digunakan dengan melakukan *study tour*, dengan menggunakan metode pembelajaran *kooperatif learning* (Hasil Wawancara tanggal 28 Juli 2015).

SA juga mengatakan bahwa, dalam hal strategi, model dan metode pembelajaran guru sebaiknya harus bisa membuat siswa mengerti betul strategi, materi, dan model pembelajaran yang digunakan, dan juga dengan adanya alat peraga yang sesuai dengan metode manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Dasar (Hasil Wawancara tanggal 31 Juli 2015). MA juga mengatakan bahwa, metode yang digunakan pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah dengan menggunakan metode ilmiah dan pengamatan (Hasil Wawancara tanggal 23 Juli 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu strategi, model dan metode pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi, model dan metode tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan pertama penggunaan strategi, model dan metode pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai dan disesuaikan dengan materi yang ada dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

- Sarana, Media, dan Alat Peraga Pembelajaran

Menurut ER : sarana, media dan alat peraga pembelajaran harus dilengkapi, dengan buku-buku di perpustakaan, majalah, koran, slide, grafik, peta, globe, dan kunjungan studi (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015). Senada dengan HO yang juga mengatakan bahwa : kelengkapan sarana, media dan alat peraga pembelajaran sangat membantu siswa dalam mengingat materi-materi yang diajarkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Hasil Wawancara tanggal 30 Juli 2015).

Hal yang berbeda dengan BA, yang mengatakan bahwa: kelengkapan sarana, media, dan alat peraga mempermudah dalam proses mengajar, akan tetapi disekolah kami dilengkapi dengan alat peraga dan adanya

keterbatasan sarana yang dibutuhkan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial contohnya perpustakaan (Hasil Wawancara tanggal 27 Juli 2015). SA juga mengatakan bahwa: sarana, media, dan alat peraga pembelajaran di sekolah kami masih sangat kurang dibandingkan sekolah-sekolah lain sedangkan materi yang kami ajarkan sama dengan sekolah lain dan perlu adanya bantuan agar harus sepadan dan sesuai dengan manajemen pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Hasil Wawancara tanggal 31 Juli 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa, sarana, media dan alat peraga sangat berpengaruh dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Akan tetapi, beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar mengalami keterbatasan dalam menyiapkan sarana, media dan alat peraga. Sehingga membutuhkan bantuan pihak pemerintah untuk membantu melengkapi sarana, media dan alat peraga, agar proses belajar mengajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar menjadi efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan instruksional.

2. Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan beberapa Kepala Sekolah tentang manajemen pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar diperoleh hasil sebagai berikut :

Menurut AG yang mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah harus memiliki peran sebagai pemimpin, supervisor dimana kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan juga sebagai motivator (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015). BU juga mengatakan bahwa kepala sekolah selaku manager yaitu menyusun perencanaan, mengordinasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi, menentukan kebijakan, mengambil keputusan, dalam mencapai tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran termasuk ilmu pengetahuan social (Hasil Wawancara tanggal 28 Juli 2015).

Sedangkan NO yang mengatakan bahwa peran Kepala sekolah yaitu : (1)

Menggerakkan guru dalam menyusun program perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar (perangkat pembelajaran), (2) Dalam pembagian pekerjaan dengan berbagai tugas khusus yang harus dilakukan selaku guru kelas pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social (Hasil Wawancara tanggal 27 Juli 2015). ZA juga mengatakan bahwa Peranan kepala sekolah sangat berpengaruh pada pembinaan dan pengawasan guru terutama kelengkapan guru dalam kelas khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar misalnya penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan pengadaan media pembelajaran (Hasil Wawancara tanggal 25 Juli 2015).

AL juga berpendapat bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin dan juga sebagai motivator guru. Tugas kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran yaitu mengadakan buku pelajaran, buku umum maupun khusus, bersama-sama guru memahami dan menjabarkan tujuan-tujuan pendidikan meliputi: tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler dan tujuan-tujuan khusus. Kepala sekolah juga diharapkan dapat memotivasi guru yaitu dengan memberi dorongan kepada guru-guru agar aktif bekerja sehingga pekerjaan itu berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran (Hasil Wawancara tanggal 31 Juli 2015). SY juga mengatakan bahwa peranan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran yaitu dengan memberikan prioritas misalnya memberikan kurikulum sebagai bahan belajar mengajar agar kegiatan pembelajaran itu terarah dan alat peraga dan membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran (Hasil Wawancara tanggal 23 Juli 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran guru sekolah dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai pemimpin, administrator, supervisor, motivator dan juga kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas. Sehingga proses belajar mengajar sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pembahasan

1. Pemahaman Guru tentang Manajemen Pembelajaran

Guru atau pendidik adalah tenaga profesional seperti yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.” Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan yuridis dan kebijakan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru sebagai pelaksana pendidikan pada pembelajaran yang bermuara akhir pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan.

Pembahasan ini didasarkan pada kajian pustaka dan pemaparan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan tentang fakta empiris yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran guru Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Adapun fokus pembahasan ditujukan pada pemahaman guru dalam manajemen pembelajaran yaitu :

a) Kurikulum

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan mencapai tujuan dan memberikan panduan terikat dan bebas terhadap materi Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar.

Secara empiris pemahaman tentang kurikulum di lapangan masih bervariasi, bergantung pada sudut pandangan masing-masing. ER mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. (Hasil wawancara tanggal 30 Juli 2015). Sedangkan AN mengartikan kurikulum sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan, dan dimana di dalam kurikulum tersebut berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan. (Hasil wawancara tanggal 28 Juli 2015). Sementara SA mengartikan kurikulum sebagai suatu pedoman yang harus dikembangkan sehingga dapat menjadi panduan proses pembelajaran (hasil wawancara tanggal 03 Agustus 2015).

Adapun MA yang mengatakan bahwa, kurikulum sebagai alat perangkat pembelajaran dan tanpa kurikulum langkah-langkah dalam proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik (hasil wawancara tanggal 23 Juli 2015). Sedangkan HA mengartikan kurikulum sebagai suatu pedoman bagi guru untuk membuat perangkat pembelajaran (hasil wawancara tanggal 03 Agustus 2015).

Berdasarkan beberapa pemahaman informasi kurikulum diatas dapat disimpulkan yaitu : (1) kurikulum merupakan pedoman dalam pembuatan perangkat pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar, (2) kurikulum merupakan rancangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan jenis mata pelajaran yang harus diberikan, alokasi waktu, tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang harus diajarkan kepada siswa di sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa : “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Dalam pengembangan kurikulum yang dilibatkan biasanya hanya guru-guru senior atau guru yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam memahami teori belajar, proses dan prosedur pendidikan, atau guru-guru yang selalu terlibat dalam urusan kurikulum.

Pengorganisasian kurikulum yang dilakukan oleh tim kurikulum selalu memperhitungkan berbagai pertimbangan seperti kelengkapan dan keluasan materi, kesesuaian dengan karakteristik siswa dan keselarasan dengan kondisi masa depan lulusan.

Orientasi lulusan Sekolah Dasar yang diharapkan adalah agar kelak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan mampu mengikuti materi yang diajarkan. Dengan kata lain materi pelajaran tingkat Sekolah Dasar yang telah diterima mampu memenuhi prasyarat materi yang harus dimiliki oleh siswa sebelum siswa itu menerima materi berikutnya.

Menurut DA, yang mengatakan bahwa : dengan adanya Kurikulum, dapat mempermudah dalam mengajarkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial karena Kurikulum tersebut tercakup semua dari segi aspek, metode, model, strategi dalam metode akan proses belajar mengajar (Hasil wawancara tanggal 28 Juli 2015). Sedangkan menurut AN pengaruh Kurikulum dalam Manajemen Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bisa tercapai jika ada manajemen, seperti yang kita ketahui manajemen adalah proses dalam rangka mencapai tujuan, dimana di dalam kurikulum pasti ada tujuan yang ingin dicapai yang berisi rancangan yang diberikan kepada peserta didik (Hasil wawancara tanggal 29 Juli 2015).

Adapun SA yang mengatakan pengaruh Kurikulum dalam Manajemen Pembelajaran dapat memberikan wawasan yang luas terhadap lingkungan khususnya wilayah Indonesia, sehingga kekayaan alam dapat dijaga dan juga dilestarikan demi masa depan bangsa yang lebih baik (Hasil wawancara tanggal 01 Juli 2015).

Dari beberapa informasi di atas tentang pengaruh Kurikulum dalam Pembelajaran pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat diambil kesimpulan bahwa Kurikulum sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan mencapai tujuan dan memberikan panduan terikat dan bebas terhadap materi Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar.

b) Manajemen Pembelajaran

Manajemen pembelajaran merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan.

Dari hasil wawancara dengan HO, yang mengatakan bahwa Manajemen Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dikatakan sebagai : (1) Manajemen bersifat terikat dengan

kurikulum menjadikan manajemen pembelajaran bersifat tertutup, (1) Manajemen bersifat bebas, dimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari materi melalui internet atau buku-buku yang lain yang artinya kurikulum mengarahkan kami dalam batasan mengajar agar anak terarah namun tidak membatasi anak untuk menambah pengetahuannya sesuai kemampuannya masing-masing (Hasil Wawancara tanggal 29 Juli 2015).

Sedangkan menurut DA, yang mengatakan bahwa manajemen pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar disusun terlebih dahulu dalam bentuk Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), media pembelajaran sebelum dilaksanakan agar pembelajaran lebih terarah (hasil wawancara tanggal 28 Juli 2015)

Selain itu, hasil wawancara dengan MA yang mengatakan, peranan kurikulum pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VI sangat luas dan selalu ada hal-hal baru sehingga peserta didik terkadang mengalami kesulitan dalam mengingat semua materi, sedangkan minat baca anak tidak semuanya sama. (hasil wawancara tanggal 23 Juli 2015).

Berdasarkan beberapa informasi diatas dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada dasarnya sudah diterapkan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku, akan tetapi tidak semua Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dapat mencapai nilai ketuntasan disebabkan adanya beberapa kondisi di beberapa sekolah yang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar di sekolah tersebut.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana masalah pendidikan dan manajemen pembelajaran di kelas merupakan masalah yang cukup kompleks dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Faktor tersebut diantaranya adalah guru, peserta didik, ruang kelas, komunikasi dalam pembelajaran, motivasi peserta didik, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, model, strategi dan metode pembelajaran. Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan di dalam kelas, kebutuhan terhadap manajemen di kelas, bukan hanya karena kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran melalui

pengoptimalan fungsi kelas namun lebih dari itu manajemen pembelajaran di dalam kelas merupakan respon terhadap semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam mengelola pembelajaran, guru sebagai manajer melaksanakan berbagai langkah-langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan dan sesuai dengan observasi lapangan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dalam konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 6 PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; "Perencanaan proses pembelajaran dengan menggunakan silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar".

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.

Dari hasil wawancara dengan ER, yang mengatakan bahwa: Perencanaan manajemen pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Membuat suatu rencana pembelajaran yang disertai dengan prinsip pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang sesuai (Hasil wawancara tanggal 30 Juli 2015.). Hal senada juga diungkapkan oleh BE bahwa, perencanaan manajemen pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berpedoman pada kurikulum yang berlaku. (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2015).

Selain itu, BA juga mengatakan bahwa : dalam perencanaan manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar diperlukan perencanaan dengan

melihat keadaan dan kebutuhan Sekolah (Hasil wawancara tanggal 27 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan manajemen pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip perencanaan dalam manajemen pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 menjelaskan bahwa "Perencanaan proses pembelajaran menggunakan silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar".

- b. Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Dalam pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan guru di ruang kelas dan pengelolaan peserta didik. Senada dengan pernyataan RA yang mengatakan bahwa, pelaksanaan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang, hanya perlu adanya tambahan jam-jam mengajar agar penyampaian materi kepada peserta didik terlaksana dengan baik (hasil wawancara tanggal 25 Juli 2015).

Akan tetapi, hasil wawancara dengan KA yang mengatakan bahwa pelaksanaan manajemen pembelajaran sudah terlaksana dengan baik namun belum secara maksimal dikarenakan ada beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam alat peraga, sehingga penyampaian materi mata pelajaran kepada peserta didik mengalami keterlambatan (hasil wawancara tanggal 23 Juli 2015).

Pernyataan berbeda dengan MA yang mengatakan bahwa, pelaksanaan manajemen pembelajaran sangatlah rumit untuk dipahami oleh peserta didik dibanding dengan mata pelajaran lainnya, dikarenakan materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat luas

sedangkan waktu yang disediakan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan manajemen pembelajaran (hasil wawancara tanggal 23 Juli 2015).

Dari beberapa informasi diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan manajemen pembelajaran Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan manajemen pembelajaran. Akan tetapi, ada beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran dikarenakan : (1) Keterbatasan Alat & Peraga, (2) Waktu yang disediakan sangatlah kurang, (3) Daya tangkap peserta didik sangat kurang untuk memahami mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial.

c. Tidaknya Suatu Strategi, Model dan Metode Pembelajaran

Menurut DA, yang mengatakan bahwa : Strategi, model dan metode yang digunakan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah melakukan *study tour*, dengan menggunakan metode pembelajaran *kooperatif learning*. Sehingga peserta didik dapat menerima materi yang ada dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (hasil wawancara tanggal 28 Juli 2015). Akan tetapi menurut ER, yang mengatakan bahwa : pilihan strategi, model dan metode dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya dengan menggunakan strategi kontekstual *teaching and learning eksposit*, *cooperative learning*, metode ceramah, demonstrasi, diskusi dan simulasi (hasil wawancara tanggal 30 Juli 2015).

Hal senada juga diungkapkan oleh HA, yang mengatakan bahwa : Manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus memiliki strategi yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran begitu juga dengan model dan metode yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan (hasil wawancara tanggal 31 Juli 2015).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya suatu strategi, model dan metode pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi, model dan metode tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan pertama penggunaan strategi model, dan metode pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai.

d. Sarana, media dan alat memiliki peran penting dalam menentukan proses belajar agar belajar menjadi efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan instruksional.

Salah satu hal yang menjadi pendorong manajemen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah tersedianya sarana, media dan alat peraga. Menurut DA, yang mengatakan bahwa : Sarana, media dan alat peraga yang memadai di Sekolah Dasar sangat mendukung untuk merancang pelaksanaan pembelajaran yang PAKEM, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran (hasil wawancara tanggal 28 Juli 2015). Hal senada juga diungkapkan RA, yang mengatakan bahwa : Sarana, media dan alat peraga sudah memadai, namun ada beberapa persoalan terhadap materi pembelajaran, dikarenakan peserta didik kurang memahami materi pembelajaran yang dibawakan oleh guru, misalnya pengenalan gambar menteri-menteri kabinet yang ada di Indonesia (hasil wawancara tanggal 25 Juli 2015).

Akan tetapi, beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar ada yang mengalami masalah dalam menyediakan sarana, media dan alat peraga. Senada dengan pernyataan SA, yang mengatakan bahwa : Sarana, media dan alat peraga di Sekolah Dasar kami masih sangat kurang memadai dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, akan tetapi materi yang akan diajarkan sama dengan sekolah-sekolah lain sehingga penyampaian materi pelaksanaan pembelajaran mengalami kendala untuk mencapai tujuan pembelajaran (hasil wawancara tanggal 31 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah memadai. Ada beberapa sekolah yang mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana, media dan alat peraga sehingga proses belajar mengajar kurang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran.

e. Evaluasi Pembelajaran atau Penilaian

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*evaluation*". Menurut Wand dan Gerald W. Brown dalam Arikunto (2010) evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh

guru. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal.

Menurut HO, yang mengatakan bahwa : penilaian tes dan unjuk kerja sangat mendorong dan membantu peserta didik untuk mengingat materi-materi yang sudah diajarkan (hasil wawancara tanggal 30 Juli 2015). Hal senada juga diungkapkan HA, yang mengatakan bahwa penilaian tes dan non tes dan juga berdasarkan tugas berkelompok dan perorangan sangat baik untuk mengetahui pemahaman peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (hasil wawancara tanggal 31 Juli 2015). SA, juga mengatakan bahwa : penilaian yang baik dilakukan dengan berkelompok, berpasangan dan perorangan sesuai dengan materi dalam manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar (hasil wawancara tanggal 31 Juli 2015).

Akan tetapi, hasil wawancara dengan BE, yang mengatakan bahwa : Penilaian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar secara teori sudah maksimal untuk dilaksanakan, namun secara praktik belum maksimal, dikarenakan sarana, tempat dan waktu masih sangat kurang (minim) (hasil wawancara tanggal 25 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian teoritik serta fakta empiris di atas dapat dikatakan bahwa, penilaian pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, alat penilaian dapat berupa tes dan non tes. Penilaian tes mencakup tertulis, lisan dan sikap.

2. Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembelajaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, Madrasah, maka kepala sekolah juga harus berjiwa wirausaha. Dengan demikian, pekerjaan

kepala sekolah semakin hari semakin meningkat dan akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan pendidikan yang diharapkan. Semua itu harus dipahami oleh kepala sekolah dan yang lebih penting adalah bagaimana kepala sekolah mampu mengamalkan dan menjadikan fungsi-fungsi tersebut dalam bentuk aksi nyata di sekolah. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala sekolah tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling terkait dan saling mempengaruhi serta menyatu dalam pribadi seorang kepala sekolah profesional. Kepala sekolah yang demikian akan mampu mendorong visi dan misi menjadi aksi dalam paradigma baru manajemen pendidikan.

Menurut AG, yang mengatakan bahwa : Peran Kepala Sekolah dalam manajemen pembelajaran sebagai pemimpin, supervisor dimana kepala sekolah sangat berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalisme guru dan juga sebagai motivator (hasil wawancara tanggal 30 Juli 2015). Senada dengan BU, yang mengatakan bahwa: Peran Kepala Sekolah selaku manager yaitu menyusun perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi, menentukan kebijakan, mengambil keputusan sehingga membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran pada mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (hasil wawancara tanggal 28 Juli 2015).

Sedangkan menurut AL, yang mengatakan bahwa : Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dan juga sebagai motivator guru. Tugas kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran yaitu mengadakan buku pelajaran, buku umum maupun khusus, bersama-sama guru memahami dan menjabarkan tujuan-tujuan pendidikan meliputi: tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler dan tujuan-tujuan khusus. Kepala sekolah juga diharapkan dapat memotivasi guru yaitu dengan memberi dorongan kepada guru-guru agar aktif bekerja sehingga pekerjaan itu berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran (hasil wawancara tanggal 30 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Rappocini Kota Makassar, memiliki peran sebagai pemimpin, administrator, supervisor, motivator dan kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di

dalam kelas, sehingga pekerjaan itu berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran.

Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah untuk itu sebagai seorang pemimpin kepala sekolah diharapkan mampu untuk berusaha membina, mengelola dan mengembangkan sumber daya-sumber daya yang ada di sekolah. Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan program-program pendidikan dan kepemimpinan pendidikan merupakan kegiatan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan. Kepemimpinan disini merujuk kepada kepala sekolah dimana seorang kepala sekolah diharapkan mampu berperan dan memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan Vol 3 No. 2 tentang Reaktualisasi Fungsi dan Peranan Kepala Sekolah (Haedar Akib : 2008), Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala sekolah tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling terkait dan saling mempengaruhi serta menyatu dalam pribadi seorang kepala sekolah profesional. Kepala sekolah yang demikian akan mampu mendorong visi dan misi menjadi aksi dalam paradigma baru manajemen pendidikan.

Fungsi dan tugas kepala sekolah diakronimkan menjadi emanslime (*education, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator* dan *entrepreneur*). Peran tersebut dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut :

a) Kepala Sekolah sebagai Edukator

Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Fungsi kepala sekolah sebagai edukator adalah menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada tenaga kependidikan serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti *team teaching, moving class* dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal.

Menurut Wahyusumidjo (1999), memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan

tersebut kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.

Sebagai edukator, kepala sekolah perlu selalu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini pengalaman akan sangat mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. Pengalaman semasa menjadi guru, wakil kepala sekolah atau anggota organisasi kemasyarakatan sangat mempengaruhi kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan pekedaaannya, demikian pula halnya pelatihan dan penataran yang pernah diikuti.

Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam peningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar anak didik dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan para guru dalam penataran atau pelatihan untuk menambah wawasannya; memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik agar giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. Hal ini bermanfaat untuk memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar dan meningkatkan prestasinya.
3. Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan.

b) Kepala Sekolah sebagai Manajer

Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dikatakan suatu proses, karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan yang dimiliki mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui persaingan yang

membuahkan kerja sama (*cooperation*), memberikan kesermpatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.

Sebagai manajer, kepala sekolah mau dan mampu mendayagunakan sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuannya. Kepala sekolah mampu menghadapi berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik, konseptual, harus senantiasa berusaha menjadi juru penengah dalam memecahkan berbagai masalah, dan mengambil keputusan yang memuaskan *stakeholders* sekolah. Memberikan peluang kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Semua peranan tersebut dilakukan secara persuasif dan dari hati ke hati.

Mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah (*partisipatif*). Dalam hal ini kepala sekolah berpedoman pada asas tujuan, asas keunggulan, asas mufakat, asas kesatuan, asas persatlilan, asas empirisme, asas keakraban, dan asas integritas. Sesuai kriteria penilaian kinerja kepala sekolah, maka kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas kepernipinannya dengan baik, yang diwujudkan dalam kemampuan menyusun program, organisasi personalia, memberdayakan tenaga kependidikan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal.

c) Kepala Sekolah sebagai Administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan di atas ke dalam tugas-tugas operasional.

Dalam berbagai kegiatan administrasi, maka membuat perencanaan mutlak diperlukan. Perencanaan yang akan dibuat oleh kepala sekolah bergantung pada berbagai faktor, diantaranya banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki, dana yang tersedia dan jangka

waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan yang dilalucukan antara lain menyusun program tahunan sekolah yang mencalarp program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan dan perencanaan fasilitas yang diperlukan. Perencanaan ini dituangkan kedalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam program semester atau catur wulan.

Di samping itu, fungsi kepala sekolah selaku administrator juga mencakup kegiatan penataan struktur organisasi, koordinasi kegiatan sekolah dan mengatur kepegawaian di sekolah.

d) Kepala Sekolah sebagai Supervisor

Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Sergiovani dan Starrat (1993) menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang lebih efektif.

Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang independen dan dapat meningkatkan objektivitas pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih cermat melaksanakan pekerjaannya.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan khususnya guru, disebut supervisi klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran efektif. Salah satu supervisi akademik yang populer adalah superwisi klinis, yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga kependidikan;
- 2) Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan;
- 3) Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan kepala sekolah;
- 4) Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru;
- 5) Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dimana supervisor lebih banyak mendengar serta menjawab pertanyaan guru daripada memberi saran dan pengarahan;
- 6) Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap, yakni pertemuan awal, pengamatan dan umpan balik;
- 7) Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan;
- 8) Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan memecahkan suatu masalah.

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam kemampuannya menyusul dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium dan ujian. Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinis dan dalam program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pemanfaatan hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah.

Kepala sekolah sebagai supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip: (1) hubungan konsultatif, kolegial dan bukan hirarkis; (2) dilaksanakan secara demokratis; (3) berpusat pada tenaga kependidikan; (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan; dan (5) merupakan bantuan profesional.

e) Kepala Sekolah sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo (1999) mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasaf, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan.

Kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin dapat dianalisis dari aspek kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifatnya yang: (1) jujur, (2) percaya diri, (3) tanggung jawab, (4) berani mengambil risiko dan keputusan, (5) berliwa besar, (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan.

Dalam implementasinya, kepala sekolah sebagai pemimpin dapat dianalisis dari tiga gaya kepemimpinan, yakni demokratis, otoriter dan bebas. Ketiga gaya tersebut sering dimiliki secara bersamaan oleh seorang pemimpin sehingga dalam melaksanakan kepemimpinannya, gaya-gaya tersebut muncul secara situasional.

Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin mungkin bergaya demokratis, otoriter dan mungkin bersifat bebas. Meskipun kepala sekolah ingin selalu bersifat demokratis, namun seringkali situasi dan kondisi menuntut untuk bersikap lain, misalnya harus otoriter. Dalam hal tertentu gaya kepemimpinan otoriter lebih cepat dan tepat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan.

Jika kepala sekolah yang memiliki tiga gaya sebagai pemimpin, maka dalam menjalankan roda kepemimpinannya dapat menggunakan strategi yang tepat sesuai tingkat kematangan para tenaga kependidikan dan kombinasi yang tepat antara perilaku tugas dan perilaku hubungan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan dalam gaya mendikte, menjual, melibatkan, dan mendelegasikan. Gaya mendikte digunakan ketika para tenaga kependidikan berada dalam tingkat kematangan rendah, sehingga perlu petunjuk serta pengawasan yang jelas.

Gaya ini disebut mendikte karena pemimpin dituntut untuk mengatakan apa, bagaimana, kapan dan dimana tugas dilakukan.

Gaya ini ditekankan pada tugas, sedangkan hubungan hanya dilakukan sekedarnya saja.

Gaya menjual dapat digunakan ketika kondisi tenaga kependidikan berada dalam taraf rendah sampai moderat sehingga mereka telah memiliki kemauan untuk meningkatkan profesionalismenya tetapi belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Gaya ini disebut menjual karena pemimpin banyak memberikan petunjuk. Dalam tingkat kematangan tenaga kependidikan seperti ini diperlukan tugas dan hubungan yang tinggi agar dapat memelihara dan meningkatkan kemauan dan kemampuan yang dimiliki.

Gaya melibatkan digunakan ketika tingkat kematangan tenaga kependidikan di sekolah berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi, yaitu ketika mereka mempunyai kemampuan tetapi kurang memiliki kemajuan kerja dan kepercayaan diri dalam meningkatkan profesionalismenya. Gaya ini disebut melibatkan, karena kepala sekolah dengan tenaga kependidikan lain bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kematangan seperti ini upaya tugas tidak digunakan, namun upaya hubungan senantiasa ditingkatkan dengan membuka komunikasi dua arah dan iklim yang transparan.

Gaya mendelegasikan digunakan oleh kepala sekolah jika tenaga kependidikan telah memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghadapi suatu persoalan, demikian pula ada kemauan untuk meningkatkan profesionalismenya.

Gaya ini disebut mendelegasikan sehingga para tenaga kependidikan dibiarkan melaksanakan kegiatan sendiri melalui pengawasan umum. Para pendidik tersebut berada pada tingkat kedewasaan yang tinggi. Dalam tingkat kematangan yang tinggi, upaya tugas hanya diperlukan sekedarnya saja, demikian pula upaya hubungan.

f) Kepala Sekolah sebagai Inovator

Dalam rangka melakukan peranan dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada tenaga kependidikan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan akan tercermin dari caranya melakukan pekerjaan

secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, obyektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, adaptable, dan fleksibel.

Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari menemukan dan melaksanakan berbagai pembaruan di sekolah. Gagasan baru tersebut misalnya *moving class*. *Moving class* adalah mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas tersendiri, yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya *Moving class* ini biasa dirangkaikan dengan pembelajaran terpadu, sehingga dalam suatu laboratorium bidang studi dijaga oleh beberapa guru yang bertugas memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam belajar.

g) Kepala Sekolah sebagai Motivator

Sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). Dorongan dan penghargaan merupakan dua sumber motivasi yang efektif diterapkan oleh kepala sekolah. Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam maupun datang dari lingkungan.

Dari berbagai faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain ke arah keefektifan (*effectiveness*) kerja, bahkan motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang berfungsi sebagai penggerak dan Pengarah.

Setiap tenaga kependidikan memiliki karakteristik khusus, yang berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus pula dari pimpinannya agar memanfaatkan waktu untuk meningkatkan profesionalismenya. Perbedaan tenaga kependidikan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam kondisi psikisnya, misalnya motivasinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, kepala sekolah perlu memperhatikan motivasi para tenaga kependidikan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh.

Terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan kepala sekolah untuk mendorong tenaga kependidikan agar mau dan mampu meningkatkan profesionalismenya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Para tenaga kependidikan akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan.
2. Tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada para tenaga kependidikan sehingga mereka mengetahui tujuannya bekerja. Para tenaga kependidikan juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut.
3. Para tenaga kependidikan harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjaannya.
4. Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan.
5. Usaha memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa kepala sekolah memperhatikannya, mengatur pengalaman sedemikian rupa sehingga setiap pegawai pernah memperoleh kepuasan dan penghargaan.

Penghargaan penting artinya untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan, tenaga kependidikan dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya secara positif dan produktif. Pelaksanaan penghargaan dapat dikaitkan dengan prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga mereka memiliki peluang untuk meraihnya. Kepala sekolah harus berusaha menggunakan penghargaan secara tepat, efektif dan efisien untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkannya.

h) Kepala Sekolah sebagai Pejabat Formal

Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal terjadi apabila jabatan atau otoritas formal dalam organisasi diisi oleh orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi ketika kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus yang dimiliki atau sumber daya yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan

persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan anggota organisasi.

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang tanpa didasarkan atas pertimbangan. Siapa pun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas. Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Secara sistem, jabatan kepala sekolah sebagai pejabat atau pemimpin formal dapat diuraikan melalui berbagai pendekatan yakni pengangkatan, pembinaan, tanggung jawab.

Sebagai pejabat formal, pengangkatan seseorang menjadi kepala sekolah harus didasarkan atas prosedur dan peraturan yang berlaku. Prosedur dan peraturan tersebut dirancang dan ditentukan oleh suatu unit yang bertanggung jawab dalam bidang sumber daya manusia. Dalam hal ini perlu ada kerjasama dengan unit yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah.

Prosedur pengangkatan memberikan petunjuk tentang sumber dari mana kandidat kepala sekolah dicalonkan, siapa yang harus mencalonkan mulai dari Tingkat Sekolah, Kabupaten, Provinsi, sampai Tingkat Pusat dan instansi terkait mana saja yang terlibat dalam proses pencalonan tersebut. Sedangkan peraturan yang dimaksud lebih ditekankan kepada persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para calon.

Klasifikasi persyaratan formal kepala sekolah yang perlu diperhatikan, yaitu bersifat administratif yang meliputi: (1) usia minimal dan maksimal, (2) pangkat, (3) masa kerja, (4) pengalaman dan (5) berkedudukan sebagai tenaga fungsional guru.

Bersifat akademis, yaitu latar belakang pendidikan formal dan pelatihan terakhir yang dimiliki oleh calon. Kepribadian: bebas dari perbuatan tercela dan loyal kepada Pancasila dan pemerintah. Pembinaan : Selama menduduki jabatan kepala sekolah, dalam rangka pembinaan kepada para kepala sekolah selaku pejabat formal yaitu; (1) diberikan gaji serta penghasilan dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) memperoleh kedudukan dalam jenjang kepangkatan terlintu, (3) memperoleh hak kenaikan gaji atau kenaikan pangkat, (4) memperoleh kesempatan untuk

menduduki jabatan yang lebih tinggi, (5) memperoleh kesempatan untuk pengembangan diri, (6) memperoleh penghargaan atau fasilitas, (7) dapat diberi teguran oleh atasannya karena sikap, perbuatan serta perilakunya yang dirasakan dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, dan (8) dapat dimutasikan atau diberhentikan dari jabatan kepala sekolah karena hal-hal tertentu.

Sebagai seorang pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap atasan, terhadap sesama rekan kepala sekolah atau lingkungan terkait dan kepada bawahan. Kepada atasan, seorang kepala sekolah mempunyai atasan, yaitu atasan langsung dan atasan yang lebih tinggi. Mengingat kedudukannya yang terkait kepada atasan/sebagai bawahan, maka seorang kepala sekolah: (1) wajib loyal dan melaksanakan apa yang digariskan oleh atasan, (2) wajib berkonsultasi atau memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan (3) wajib selalu memelihara hubungan yang bersifat hirarki antara kepala sekolah dan atasan.

Kepada sesama rekan kepala sekolah atau instansi terkait kepala sekolah: (1) wajib memberikan hubungan kerja sama yang baik dengan para kepala sekolah yang lain, dan (2) wajib memelihara hubungan kerja sama sebaik-baiknya dengan lingkungan baik dengan instansi terkait maupun tokoh-tokoh masyarakat dan BP3. Kepada bawahan, kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya dengan para guru, staf dan siswa, sebab esensi kepemimpinan adalah kepengikutan orang lain.

Peranan kepala sekolah sebagai pejabat formal secara singkat dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah diangkat dengan surat keputusan oleh atasan yang mempunyai kewenangan dalam pengangkatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta hak-hak dan sanksi yang perlu dilaksanakan; secara hirarki mempunyai atasan langsung, atasan yang lebih tinggi dan memiliki bawahan; dan mempunyai hak kepangkatan, gaji dan karier.

Dari peranan diatas dan sesuai dengan hasil observasi dilapangan, kepala sekolah memiliki peran sebagai *education, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator* dan entrepreneur dan kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam

mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.

Sebagai Kepala Sekolah dalam manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran IPS SD menyiapkan merencanakan pengawasan terhadap kinerja guru dimulai dari perencanaan manajemen pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka pada bab ini ditarik kesimpulan sebagai berikut: Manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial . Manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, silabus Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Rencana Pelaksanaan (RPP), serta bahan ajar sesuai dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Guru dalam hal ini berperan sebagai manajer dalam sebuah kelas yang bertugas mengelola pembelajaran dan hasil belajar. Manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan siswa. Namun dalam hal ini peneliti menemukan beberapa persoalan diluar dari manajemen pembelajaran berupa : (1) Materi pelajaran yang meluas, (2) Keterbatasan ekonomi (3) Sarana dan prasarana yang terbatas, (4) Alat peraga yang kurang memadai, dan (5) Terbatasnya waktu belajar siswa di dalam kelas.

Peranan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar Peran kepala sekolah di Sekolah Dasar yang terletak di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam manajemen pembelajaran dapat dilihat dari perencanaan, kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas dan sebagai kepala sekolah dalam

manajemen pembelajaran guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar bertugas menyiapkan dan merencanakan serta pengawasan terhadap kinerja guru dimulai dari perencanaan manajemen pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, pengorganisasian, pelaksanaan program kepala sekolah berperan sebagai fasilitator dan *motivator*, dalam pengevaluasian program, kepala sekolah berperan sebagai *evaluator* dan pengawasan untuk pelaksanaan pengajaran dalam mengarahkan guru untuk menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Keberhasilan sekolah sebagai keberhasilan kepala sekolah merupakan pernyataan tentatif yang perlu dicermati mengingat kepala sekolah senantiasa dihadapkan pada tantangan dalam melakukan perubahan dan pengembangan sekolah secara berencana, terarah dan berkesinambungan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Untuk mencapai semua hal tersebut diperlukan beberapa terobosan seperti bagaimana cara kepala sekolah menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi baik secara personal maupun institusional.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam pembahasan maka pada bagian ini hal-hal yang disarankan dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut : (1) Bagi guru untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan semangat kerja serta kedisiplinan yang telah terbina. (2) Bagi kepala sekolah untuk selalu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta menganalisis temuan sebagai bahan evaluasi meningkatkan manajemen pembelajaran. (3) Bagi Pemerintah diharapkan agar meninjau kembali kebutuhan sekolah dasar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar misalnya dalam hal sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pembelajaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi Rulam. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Ar-Ruzz Media.
- Akib, Haedar. 2008. *Reaktualisasi Fungsi dan Peranan Kepala Sekolah*, Jurnal Tenaga Kependidikan Vol 3 No 2 Agustus. Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Miles, Huberman., Saldana, Jhonny, 2013. *Qualitative Data Anaysis : A Methods Source Book* SAGE Publication.

(<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>)

Rakhmiyanti.2013. *Studi Tentang Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Libureng Kabupaten Bone .Skripsi*. Tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Satori, & Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

Sukmadinata Syaodih Nana. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suparlan. 2010. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2014. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen. 2014. Bandung: Penerbit Citra Umbara.